



## Evaluasi Pendidikan dalam Konteks Aspek Politik, Etika dan Interpersonal

Linda Wastri<sup>1</sup>, Nailis Saadah<sup>2</sup>, Zulmuqim<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> SMKN 1 Batipuh, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail Korespondensi : [lindawastri@gmail.com](mailto:lindawastri@gmail.com)

DOI: 10.47435/al-qalam.v15i2.2372

### Submission Track:

[||Diterima: 5 Desember 2023.||Disetujui: 18 Desember 2023.||Dipublikasikan: 19 Desember 2023.](#)

Copyright © 2023 Linda Wastri, Nailis Saadah, Zulmuqim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### Abstract

*The evaluation of educational programs is designed to identify improvements needed in the education system. In practice, program evaluation also involves political dimensions that should be a concern for both evaluators and the parties being evaluated. Furthermore, the relationship between morality and individuals is also an integral part of the ethical code used in the assessment. This article aims to explain the importance of ethical and political aspects in the implementation of educational program evaluation. The research method used is a literature review in which the author gathers information related to the ethical and political aspects when evaluating educational programs. Research findings indicate that several factors influence the relationship between ethics and individuals in educational assessment, including religious beliefs, moral values embedded in culture, treatment by the educational community, messages conveyed through mass media, and environmental conditions.*

**Keywords:** Ethics; Interpersonal; Evaluation; Educational Program

### Abstrak

Evaluasi program pendidikan dirancang untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam sistem pendidikan. Dalam praktiknya, evaluasi program juga melibatkan dimensi politik yang harus menjadi perhatian baik bagi penilai maupun pihak yang dievaluasi. Selain itu, hubungan antara moralitas dan individu juga merupakan bagian integral dari kode etik yang digunakan dalam penilaian. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya aspek etika dan politik dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dimana penulis mengumpulkan informasi terkait aspek etika dan politik ketika mengevaluasi program pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara etika dan individu dalam penilaian pendidikan, antara lain keyakinan agama, nilai-nilai moral yang dimunculkan dalam budaya, perlakuan oleh komunitas pendidikan, pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa, dan kondisi lingkungan.

**Kata Kunci:** Etika; Interperson; Evaluasi; Program Pendidikan

### 1. Pendahuluan

Evaluasi dalam konteks pendidikan tidak hanya terbatas pada proses penilaian, baik itu dalam bentuk formatif maupun sumatif. Meskipun penilaian merupakan aspek penting dari evaluasi, memandangnya hanya sebagai penilaian belaka adalah sudut pandang yang terbatas. Penilaian sering kali terfokus pada pencapaian tujuan pembelajaran, namun seharusnya tidak hanya mempertimbangkan nilai akhir.

Evaluasi seharusnya mencakup aspek-aspek lebih luas daripada sekadar pencapaian tujuan. Selama proses pendidikan, berbagai faktor dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Evaluasi juga dapat mendorong untuk lebih aktif dalam belajar secara terus menerus dan juga mendorong pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran (Danial et al., 2019) (Rahmah, Nuraziza, 2023). Oleh karena itu, evaluasi harus memperhitungkan faktor-faktor ini dan tidak hanya terpaku pada aspek penilaian. Evaluasi harus dianggap sebagai bagian integral dari supervisi di dunia pendidikan (Agustanico Dwi Muryadi, 2017).

Evaluasi program pendidikan dirancang untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam sistem pendidikan. Dalam praktiknya, evaluasi program juga melibatkan dimensi politik yang harus menjadi perhatian baik bagi penilai maupun pihak yang dievaluasi. Selain itu, hubungan antara moralitas dan individu juga merupakan bagian integral dari kode etik yang digunakan dalam penilaian. Kita semua sebagai pendidik perlu memahami pentingnya aspek etika dan politik dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan. Metode penelitian yang dapat digunakan termasuk tinjauan literatur, di mana dapat mengumpulkan informasi terkait aspek etika dan politik ketika mengevaluasi program pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih & Fadriati, (2022) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara etika dan individu dalam penilaian pendidikan, termasuk keyakinan agama, nilai-nilai moral yang dimunculkan dalam budaya, perlakuan oleh komunitas pendidikan, pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa, dan kondisi lingkungan. Dengan kerja sama dan kesadaran akan aspek-aspek ini, kita dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, tepat sasaran, dan terencana. Kegiatan evaluasi melibatkan dua orang atau lebih. Untuk memperoleh bukti dan data secara detail, proses penilaian dilakukan dengan berbagai metode untuk mengidentifikasi perubahan, kelemahan dan kekuatan proses dan sistem yang telah dan sedang diterapkan. Evaluasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk merencanakan, memperbaiki, mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan (Teni Aryanti, Supriyono Supriyono, 2018).

Evaluasi program pendidikan adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu program pendidikan agar siap digunakan dan diterapkan oleh lembaga pendidikan serta perancang perencana program pendidikan. Kegiatan evaluasi program pendidikan bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana kegiatan yang telah dirancang (Ananda & Rafida, 2017).

Evaluasi program pendidikan merupakan suatu cara yang digunakan untuk meningkatkan mutu program pendidikan agar dapat diadopsi dan dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga pendidikan dan perencana program pendidikan. Tujuan utama evaluasi program pendidikan adalah untuk mengukur keberhasilan inisiatif program, memastikan kesiapan program, dan mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai (Arikunto & Jabar C, 2014).

Beberapa pihak terlibat dalam proses evaluasi program. Pertama, terdapat evaluator yang dapat berupa individu atau lembaga yang bertugas melaksanakan evaluasi. Selain itu, ada para pelaksana evaluasi program yang memiliki tanggung jawab etis terhadap semua pihak yang terlibat dalam program yang dievaluasi. Selanjutnya, masyarakat berperan sebagai penerima laporan hasil evaluasi dan pemberi tugas untuk melakukan evaluasi. Terakhir, evaluator lain mungkin melakukan analisis ulang terhadap data hasil evaluasi dan kemungkinan menginterpretasi kembali informasi tersebut.

Dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan, partisipasi seluruh pihak terkait merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi. Pertama, sponsor adalah orang atau kelompok yang meminta atau mendanai evaluasi. Kedua, pemirsa adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam proses evaluasi program. Terakhir, evaluator program adalah individu yang bertanggung jawab melakukan evaluasi program secara komprehensif.

Menurut Setiadi, (2015) dalam pelaksanaan evaluasi program Pendidikan, diperlukan adanya pendekatan dalam melengkapi kepentingan evaluasi program yang akan dilaksanakan. Selain itu, dalam hal pendekatan, evaluasi membutuhkan data– data dan informasi penting yang kemungkinan akan membutuhkan kesepakatan antara evaluator dan object evaluasi. Pendekatan yang dilakukan bisa berupa pendekatan kualitatif dan deskriptif. Jadi, dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan, diperlukan pendekatan yang menyeluruh untuk memenuhi kepentingan evaluasi, dengan

memperhatikan kesepakatan antara evaluator dan objek evaluasi serta memanfaatkan data dan informasi yang relevan, termasuk menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif.

Pihak evaluator dan objek evaluasi mencapai kesepakatan melalui proses tawar-menawar, di mana terjadi saling penerimaan antara keduanya. Kesepakatan tersebut melibatkan aspek-etika dan juga terwujud dalam bentuk kesepakatan interpersonal. Menurut Tanyid Madiantius, (2014) Kesepakatan sangat penting pada saat melakukan evaluasi proyek karena evaluasi merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan dua orang atau lebih yang berkepentingan dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan, dimana kesepakatan juga merupakan bagian dari etika dalam melakukan evaluasi.

Evaluasi program juga harus mempertimbangkan faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi dan dampak program. Evaluasi harus mempertimbangkan sejauh mana program sesuai dengan kebijakan publik yang ada dan sejauh mana program tersebut mendukung atau melanggar agenda politik pemerintah. Evaluasi harus mempertimbangkan dukungan politik dari para pemimpin dan pihak-pihak yang berwenang, serta pengaruh politik terhadap keberlanjutan dan perkembangan program Lembaga: Evaluasi harus mempertimbangkan hubungan dan interaksi antar lembaga atau organisasi yang terlibat dalam implementasi program, termasuk bagaimana dinamika politik mempengaruhi kerja sama dan koordinasi antar lembaga.

Aspek politik dalam evaluasi program penting untuk dipertimbangkan karena evaluasi program dapat memiliki implikasi politik yang luas. Evaluasi program dapat digunakan untuk membuat keputusan tentang kebijakan publik, anggaran, dan sumber daya. Oleh karena itu, evaluasi program perlu dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan kontroversi politik. Selain itu kesepakatan moral dalam evaluasi program juga merupakan suatu hal yang urgen karena evaluasi program melibatkan nilai-nilai dan etika. Evaluasi program harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan urgensi kesepakatan interpersonal dalam evaluasi program disebabkan evaluasi program melibatkan interaksi antara evaluator dan pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan interpersonal yang baik akan memudahkan proses evaluasi program dan meningkatkan kepercayaan antara evaluator dan pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Evaluasi dalam Konteks Aspek Politik, Etika dan Interpersonal

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai metode untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis data yang relevan dari sumber-sumber literatur yang ada. Menurut Sujarweni, (2014), Pendekatan studi kepustakaan memiliki peran penting dalam membangun konsep atau teori yang dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Menurut Nazir, (2003) juga menjelaskan bahwa metode studi kepustakaan merupakan cara untuk menggali data dengan menelaah buku-buku dan sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan melakukan analisis teoritis, referensi, serta literatur ilmiah terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang terkait dengan situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian pustaka, peneliti mengumpulkan sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel dari media massa yang relevan dengan topik penelitian. Dalam konteks ini, penulis mendalami, mengevaluasi, dan mengkaji literatur-literatur yang terkait dengan aspek-etika dan aspek-interpersonal dalam evaluasi program, dengan niat untuk menyusunnya menjadi sebuah artikel ilmiah.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Kesepakatan Etika**

Ada tiga tahap dalam menentukan apakah suatu program bisa dievaluasi atau tidak: 1) mengklarifikasi teori dan model program yang diinginkan, 2) mengevaluasi implementasi program untuk memastikan kesesuaian dengan model atau teori program dan kemampuan mencapai tujuan program dengan benar, 3) mencari berbagai pendekatan evaluasi yang berbeda untuk menilai sejauh mana evaluasi tersebut memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan dan layak untuk dijalankan, 4) mencapai kesepakatan tentang prioritas-prioritas evaluasi dan penggunaan hasil evaluasi yang diharapkan (Sri Wahyuningsih & Fadriati, 2022).

Dalam konteks evaluasi program pendidikan, terdapat beberapa hal yang harus disepakati bersama oleh evaluator, audiens, dan pelaksana evaluasi. Hal-hal tersebut mencakup analisis kebutuhan, perencanaan anggaran (*budgeting*), penjadwalan (*scheduling*), penugasan tugas, serta isi proposal evaluasi program. Kesepakatan mengenai aspek-aspek ini membantu memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan terencana, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kesepakatan ini juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan komitmen terhadap proses evaluasi.

Max Weber menganggap kesepakatan sebagai suatu bentuk koordinasi sosial yang muncul dari tindakan rasional di mana individu atau kelompok-kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mary Parker Follett menekankan pentingnya kesepakatan sebagai hasil dari integrasi kebutuhan dan keinginan semua pihak yang terlibat dalam suatu situasi. Ia mengajukan konsep integrasi kepentingan (*integrative interest*) sebagai landasan bagi kesepakatan yang saling menguntungkan. Stephen, (2015) menyebut kesepakatan sebagai "persetujuan timbal balik antara dua pihak atau lebih." Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan adalah suatu sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain.. Kesepakatan dapat berupa konsensus atau pernyataan kehendak yang disepakati oleh satu atau lebih pihak. Kesepakatan dapat terjadi melalui proses perundingan atau negosiasi.

Dalam kesepakatan, biasanya terjadi negosiasi antara kedua pihak sebagai manifestasi dari niat yang diungkapkan oleh keduanya. Dalam konteks ini, terdapat tawaran dan penerimaan yang melibatkan kedua belah pihak (Agus Yudha Hernoko, 2010). Dalam pelaksanaan evaluasi, seorang evaluator mengkomunikasikan maksud dan tujuan evaluasi kepada objek evaluasi atau pihak yang dievaluasi. Selanjutnya, pihak yang dievaluasi memberikan penawaran mengenai apa yang mereka harapkan dari proses evaluasi. Selanjutnya, evaluator memiliki hak untuk menerima penawaran tersebut atau melakukan negosiasi agar mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Etika merupakan aspek yang sangat krusial dalam semua jenis aktivitas dan kegiatan, baik yang bersifat formal maupun informal. Etika dapat dijelaskan sebagai penilaian atau perilaku individu yang berkaitan dengan nilai-nilai moral (Setiadi, 2015). Etika merupakan pandangan, keyakinan dan nilai terhadap sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Ilmu etika juga disebut Etimologi yang berasal dari bahasa Yunani "Ethos" yang diartikan kelakuan yang pantas dan diharapkan. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: "Susila (sansekerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. Menurut para ahli etika merupakan aturan perilaku, kebiasaan manusia dalam pergaulan dengan sesama dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kata etika sering juga disebut etik atau ethos yang berarti norma, nilai dan ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik (Sri Wahyuningsih & Fadriati, 2022).

Etika memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Etika mencerminkan bagaimana manusia menjalani kehidupan sehari-hari. Etika membantu individu dalam mengambil keputusan, menentukan sikap, dan mengarahkan tindakan mereka dalam menjalani kehidupan. Yang perlu dicatat adalah bahwa etika dapat diterapkan dalam berbagai aspek dan sudut pandang kehidupan manusia. Jika dipahami secara mendalam, etika bukan hanya tentang penilaian antara yang baik dan buruk, atau sekadar nilai-nilai, melainkan lebih dari itu, etika adalah tentang membentuk kebiasaan baik dan mencapai kesepakatan berdasarkan nilai-nilai yang baik dan benar (Tanyid Madiantius, 2014).

Etika memiliki sifat kritis yang mendasar karena ia mempertanyakan norma-norma yang dianggap berlaku, mencari dasar dari norma-norma tersebut, dan mempertanyakan hak setiap lembaga, seperti orang tua, sekolah, negara, dan agama, untuk memberikan perintah atau larangan yang harus diikuti (Praja, 2008). Dalam konteks etika, terdapat dua pendekatan utama. Pertama, etika deskriptif yang membahas fakta-fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang ada dalam budaya. Kedua, etika normatif yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang dianggap ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, serta menentukan tindakan-tindakan yang memiliki nilai dalam kehidupan.

Etika berakar pada nilai-nilai. Nilai-nilai ini terkait dengan cara evaluator dan pihak-pihak lainnya melihat dan memahami apa yang dianggap baik atau buruk, berharga atau tidak berharga,

berguna atau tidak berguna, serta bermanfaat atau tidak bermanfaat. Etika juga melibatkan pandangan terhadap perilaku yang dianggap baik atau buruk, yang dipertimbangkan dengan akal sehat, terutama oleh seorang evaluator. Pertimbangan mengenai perilaku baik atau buruk ini didasarkan pada tanggung jawab terhadap dampak dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, seorang evaluator yang etis selalu mempertimbangkan dengan penuh tanggung jawab konsekuensi baik dan buruk dari tindakan yang akan diambil, baik bagi orang lain, masyarakat, dirinya sendiri, maupun lingkungan pada umumnya.

Dalam konteks evaluasi program, nilai-nilai yang dimaksud merujuk pada aspek-aspek yang dianggap baik, berharga, bermanfaat, dan berguna bagi kehidupan evaluator, interaksinya dengan pihak-pihak yang meminta evaluasi, pelaksana program, komponen-komponen yang dievaluasi, pengguna hasil evaluasi, dan juga lingkungannya. Nilai-nilai ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan beragam faktor yang memengaruhi kehidupan manusia, seperti keyakinan agama, norma moral dalam budaya, pengaruh pendidikan, pesan-pesan yang disampaikan melalui media massa, situasi lingkungan, dan sebagainya.

Terkait dengan evaluasi program, etika mencakup prinsip-prinsip yang mengatur tindakan baik individu maupun kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan serta hasil evaluasi program. Untuk memahami dengan baik tanggung jawab etika seorang individu atau kelompok evaluator, penting untuk memahami nilai-nilai yang mereka anut ketika mereka mempersiapkan dan melaksanakan evaluasi. Sebagai contoh, perhatikan situasi lingkungan di mana seorang evaluator menganggap bahwa evaluasi program merupakan bagian dari aktivitas politik, dengan tujuan untuk mendukung atau menentang program yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah atau swasta. Namun, evaluator lain memiliki pandangan yang berbeda, karena mereka menganggap evaluasi program sebagai suatu kegiatan ilmiah.

Evaluator yang termasuk dalam kelompok pertama percaya bahwa evaluasi program adalah tugas yang harus mereka lakukan, setidaknya dengan memahami konteks politik dalam evaluasi program tersebut. Di sisi lain, evaluator yang termasuk dalam kelompok kedua berpandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab etika untuk mempertimbangkan konteks politik dalam evaluasi program, melainkan mereka melihat evaluasi program sebagai proses yang melibatkan variabel-variabel yang relevan yang perlu dianalisis dalam mengamati proses dan hasil dari program evaluasi.

Tanggung jawab etika dalam evaluasi program telah diajukan oleh Weiss, yang mengemukakan bahwa evaluasi program telah mengalami politisasi. Menurutnya, evaluator yang terlibat dalam evaluasi program yang terkait dengan aktivitas masyarakat akan menghadapi berbagai isu, seperti posisi dan fungsi mereka, masalah operasional, permasalahan karier, dan imbalan yang terlibat. Bahaya yang muncul adalah evaluasi program semakin terlibat dalam aspek politik. Efek politisasi ini juga menyebabkan banyak anggota masyarakat mengawasi proses dan hasil evaluasi program, sehingga pertimbangan etika juga dipengaruhi oleh banyak pengamat masyarakat yang memantau proses dan hasil evaluasi program tersebut. Pertimbangan etika ini bergantung pada nilai-nilai yang ada dalam struktur etika. Tanggung jawab etika dalam evaluasi program melibatkan tidak hanya evaluator program, tetapi juga berbagai profesional lain, seperti penulis atau pengarang, yang memerlukan pedoman etika standar. Studi kepustakaan yang mendalam tentang etika dalam evaluasi program belum dilakukan secara luas, dan proses penyusunan dan pengembangan etika dalam evaluasi program masih berlangsung (Djuju Sudjana, 2006).

Kesepakatan etik dalam evaluasi program merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara evaluator dan pihak yang dievaluasi, yang melibatkan proses penawaran dan penerimaan antara keduanya. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan prinsip keadilan dan objektivitas. Dalam konteks program pendidikan, penting untuk memperkenalkan kesepakatan etik dan interpersonal dalam evaluasi kepada seluruh pendidik, karena evaluasi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kesepakatan etik dalam evaluasi program juga merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan evaluasi (Sri Wahyuningsih & Fadriati, 2022).

Kesepakatan etika menetapkan pedoman dan standar untuk memastikan bahwa evaluasi program dilakukan dengan integritas dan keadilan. Kesepakatan ini membantu melindungi hak-hak

dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam proses evaluasi serta meningkatkan kredibilitas dan keandalan temuan-temuannya (Patton, 2018).

Kesepakatan etik dalam evaluasi program merupakan suatu persetujuan formal atau informal yang dibuat antara evaluator (pihak yang melakukan evaluasi) dan objek evaluasi (pihak yang dievaluasi), yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan dengan adil, transparan, dan objektif. Kesepakatan ini membantu mengatur perilaku dan hubungan antara kedua belah pihak, serta memastikan integritas dan akurasi hasil evaluasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang aspek-aspek utama dari kesepakatan etik dalam evaluasi program (Evaluation., 2011).

- a. **Transparansi dan Keterbukaan:** Pihak evaluator harus menjelaskan tujuan, metode, skala evaluasi, dan harapan hasil kepada pihak yang dievaluasi dengan jelas dan transparan. Pihak yang dievaluasi harus diberi kesempatan untuk memahami dan memberikan masukan terkait dengan proses evaluasi.
- b. **Objektivitas:** Kesepakatan etik harus menekankan bahwa evaluasi akan dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Evaluator harus memastikan bahwa penilaian didasarkan pada bukti dan data yang valid, bukan pada pandangan pribadi atau bias tertentu.
- c. **Pemerataan Akses dan Kesempatan:** Kesepakatan harus memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan evaluasi memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi. Pihak yang dievaluasi harus diberikan kesempatan untuk memberikan informasi, memberikan klarifikasi, atau mengemukakan pandangan mereka.
- d. **Kerahasiaan dan Privasi:** Kesepakatan harus mencakup komitmen untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi sensitif yang terkait dengan evaluasi. Pihak evaluator harus memastikan bahwa data individu atau informasi yang bisa mengidentifikasi tidak diungkapkan tanpa izin yang tepat.
- e. **Komitmen terhadap Perbaikan dan Pembelajaran:** Evaluasi harus dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki program dan memajukan tujuan organisasi, bukan sebagai bentuk hukuman. Pihak evaluator dan dievaluasi harus berkomitmen untuk memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan program dan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- f. **Kesetaraan dan Keadilan:** Kesepakatan etik harus mencerminkan prinsip kesetaraan, memastikan bahwa evaluasi memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak mendiskriminasi berdasarkan status sosial, budaya, atau lainnya.
- g. **Penghormatan terhadap Kode Etik Profesional:** Pihak evaluator harus berjanji untuk mematuhi standar etika dan pedoman yang berlaku dalam profesi evaluasi, dan bertindak sesuai dengan integritas profesional.

Dengan membangun kesepakatan etik yang kuat, evaluasi program dapat dilakukan dengan lebih baik, menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk meningkatkan kinerja program dan mencapai tujuan.

### **3.2. Kesepakatan Interpersonal**

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terjalin antara individu dengan individu lainnya. Hubungan interpersonal melibatkan proses komunikasi timbal balik dalam bentuk pesan, baik secara lisan maupun non-lisan. Prinsip dasar dalam hubungan interpersonal adalah menjaga keseimbangan dalam interaksi, di mana kedua belah pihak memberikan dan menerima dengan adil (*equity*) dalam interaksi sosial yang berlangsung bersama. Kunci sukses dalam hubungan antarpribadi melibatkan berbicara tentang kesamaan yang dimiliki dengan orang lain, memperhatikan minat dan kesenangan orang lain, memberikan perasaan bahwa orang tersebut penting, mengingat nama orang, memiliki rasa percaya diri, menjaga penampilan yang bersih dan rapi, menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang menyenangkan, serta siap untuk menerima kritik (Sri Wahyuningsih & Fadriati, 2022).

Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima dapat menanggapi secara langsung pula. Komunikasi interpersonal adalah suatu *action oriented* yaitu suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan Komunikasi interpersonal diantaranya adalah

:(1)Mengungkapkan perhatian kepada orang lain,(2). Menemukan diri sendiri,(3). Menemukan dunia luar,(4). Membangun dan memelihara hubungan yang harmonis,(5). Mempengaruhi sikap dan tingkah laku,(6). Menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi,(7). Memberikan bantuan atau konseling,(8).Mencari kesenangan atau menghabiskan waktu

Salah satu tanda bahwa proses komunikasi interpersonal telah terjadi adalah adanya interaksi. Interaksi adalah tindakan yang berjalan dua arah, artinya terdapat hubungan saling mempengaruhi. Dalam konteks ini, interaksi terjadi ketika komunikator (pengirim) berinteraksi dengan komunikan (penerima) dalam pertukaran pesan atau informasi (Muhammad Budyatna, 2012).

Pada komunikasi interpersonal, ada beberapa asas yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan komunikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Dalam hal memformulasikan maupun menerima pesan, sangat dipengaruhi oleh jalannya pikiran orang bersangkutan. Agar komunikasi dapat berjalan efektif, maka harus memiliki pengalaman bersama dalam memahami pesan.
- b. Orang yang bisa mengerti suatu hal dengan menghubungkan pada sesuatu hal lain yang telah dimengerti. Artinya ketika memahami suatu informasi, seseorang akan menghubungkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimengerti.
- c. Setiap orang berkomunikasi tentunya mempunyai tujuan. Komunikasi interpersonal bukanlah yang pasif melainkan berorientasi pada tujuan tertentu.
- d. Orang yang telah melakukan komunikasi mempunyai suatu kewajiban untuk meyakinkan dirinya bahwa ia memahami makna pesan yang akan disampaikannya.
- e. Orang yang tidak memahami makna informasi yang diterima, memiliki kewajiban untuk menerima penjelasan agar tidak terjadi bias komunikasi. Untuk menghindari ketidakpahaman, diperlukan klarifikasi untuk memahami arti pesan (Rd. Nia Kania Kurniawati, 2013).

Kesepakatan interpersonal dalam evaluasi program pendidikan mencakup aspek-etik dan hubungan antar individu yang terlibat dalam proses evaluasi program. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan dengan integritas, sesuai dengan prinsip-prinsip etika, dan dengan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Beberapa faktor penting dalam kesepakatan interpersonal dalam evaluasi program pendidikan mencakup keterbukaan, kerjasama, kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan negosiasi. Kesepakatan interpersonal ini memiliki peran vital dalam menjaga kredibilitas evaluasi dan memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program pendidikan (Ambyar, 2019).

Dalam pelaksanaan evaluasi program pendidikan, hubungan interpersonal dan kesepakatan interpersonal merujuk pada perjanjian yang dibuat oleh evaluator dengan pihak lain yang terlibat dalam proses evaluasi secara individu. Para evaluator memiliki tanggung jawab etika dan profesional untuk menjaga privasi individu yang terlibat dalam program pendidikan yang dievaluasi dan untuk menjaga kerahasiaan data, kecuali jika izin diberikan untuk mengungkapkan data tersebut kepada pihak eksternal.

Hubungan interpersonal, termasuk hubungan utama antara evaluator dan pihak lainnya, sangat penting, terutama dengan pengelola program. Laporan evaluasi disampaikan oleh evaluator kepada pengelola program, penyelenggara program, pihak yang mendanai program, dan berbagai pihak terkait lainnya. Sumber dana yang diterima oleh evaluator mungkin berasal dari pengelola program, penyelenggara program, penyandang dana, dan pihak-pihak lainnya. Dengan adanya kesepakatan interpersonal antara evaluator dan pihak lain secara individu, evaluator akan dapat membuat laporan hasil evaluasi dengan pertimbangan yang lebih bijak, sesuai dengan proses yang telah disepakati melalui interaksi antarpribadi

Kesepakatan interpersonal antar evaluator dan pihak lain secara perorangan, maka evaluator akan lebih bijak dalam membuat laporan hasil evaluasi dengan pertimbangan dan proses yang telah disepakati secara interpersonal. Kesepakatan etik dan kesepakatan interpersonal dalam evaluasi program merupakan bagian dari kode etik dalam melaksanakan kegiatan evaluasi. Kode etik evaluasi ini penting untuk evaluasi program, evaluator, penyelenggara evaluasi, dan pemesan atau pengguna

hasil evaluasi program. Kode etik dalam evaluasi bertujuan sebagai rujukan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi sehingga dapat memenuhi kriteria, objektivitas, observabilitas, validitas, reliabilitas, dan usabilitas.

Kesepakatan interpersonal dalam evaluasi mengacu pada perjanjian atau aturan yang diatur antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses evaluasi program. Kesepakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar individu dan kelompok yang terlibat dalam evaluasi program berjalan dengan baik, saling menghormati, dan mendukung pencapaian tujuan evaluasi dengan efektif (Patton, 2018).

Berikut adalah beberapa aspek penting dari kesepakatan interpersonal dalam evaluasi:

- a. Keterbukaan dan Transparansi: Memastikan keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi antar pihak yang terlibat, baik itu antara evaluator, pihak yang dievaluasi, atau pihak-pihak lain yang terkait. Memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan evaluasi, proses evaluasi, metode yang akan digunakan, dan harapan yang dimiliki oleh setiap pihak.
- b. Pertimbangan dan Kepedulian: Mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pandangan dan kebutuhan setiap pihak yang terlibat. Menyediakan ruang untuk menerima umpan balik dan saran dari semua pihak yang terlibat dalam evaluasi.
- c. Kerjasama dan Kolaborasi: Mendorong kerjasama antar individu dan kelompok, membangun tim yang efektif, dan memastikan bahwa evaluasi dilakukan sebagai suatu usaha tim. Memfasilitasi pertukaran ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas evaluasi.
- d. Penghormatan dan Empati: Menghormati perbedaan pendapat, nilai, dan budaya antar individu dan kelompok yang terlibat dalam evaluasi. Menunjukkan empati terhadap pengalaman dan perspektif orang lain.
- e. Pengakuan Kontribusi: Mengakui kontribusi yang diberikan oleh setiap individu atau kelompok dalam evaluasi program. Memberikan apresiasi dan penghargaan atas upaya dan hasil yang dicapai bersama (Creswell, 2017).

#### **4. Kesimpulan**

Pertimbangan terhadap aspek politik dalam evaluasi program menjadi sangat penting karena hasil evaluasi program memiliki dampak yang luas dalam konteks politik. Evaluasi program tidak hanya berpengaruh pada kebijakan publik, tetapi juga dapat memengaruhi keputusan terkait anggaran dan alokasi sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi evaluasi program untuk dilakukan dengan penuh objektivitas dan transparansi guna menghindari potensi kontroversi politik. Selain aspek politik, kesepakatan moral dalam evaluasi program juga menjadi hal yang krusial, mengingat evaluasi tersebut melibatkan penilaian terhadap nilai-nilai dan etika tertentu. Untuk mencegah dampak negatif dan konflik moral, evaluasi program harus dilaksanakan secara etis dan bertanggung jawab, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Sementara itu, kesepakatan interpersonal juga mendapat urgensi karena proses evaluasi program melibatkan interaksi antara evaluator dan stakeholder terkait. Kualitas hubungan interpersonal yang baik dapat mempermudah jalannya evaluasi program, sekaligus meningkatkan kepercayaan antara evaluator dan pihak-pihak yang terlibat.

#### **Daftar Pustaka**

- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*. Penerbit Kencana.
- Agustanico Dwi Muryadi. (2017). MODEL EVALUASI PROGRAM DALAM PENELITIAN EVALUASI. *Jurnal Ilmiah PENJAS*, 5(1), 1–8.
- Ambyar. (2019). *Metode Penelitian Evaluasi Program* (1st ed.). Alfabeta.
- Ananda & Rafida. (2017). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Perdana Publishing.
- Arikunto & Jabar C. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.



- Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Danial, D., Nurjannah, N., & Mirna, M. (2019). Evaluation of The Learning Program of Mathematics Study Program at Islamic Institute Of Muhammadiyah Sinjai. *Matematika Dan Pembelajaran*, 7(1), 65. <https://doi.org/10.33477/mp.v7i1.1046>
- Djuju Sudjana. (2006). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Rosda Karya.
- Evaluation., J. C. on S. for E. (2011). *The Program Evaluation Standards: A Guide for Evaluators and Evaluation Users (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Muhammad Budyatna. (2012). *Teori komunikasi Antarpribadi*. Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Patton, M. Q. (2018). *Principles-Focused Evaluation: The GUIDE*. Guilford Press. Rallis.
- Praja, J. S. (2008). *Aliran-aliran Filsafat dan Etik*. Prenada Media.
- Rahmah, Nuraziza, D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Guru Matematika di SMK Negeri 2 Sinjai. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 2, 44–49.
- Rd. Nia Kania Kurniawati. (2013). *Komunikasi antarpribadi (Konsep dan Teori dasar)*. Graha Ilmu.
- Setiadi, A. (2015). Pelanggaran Etika Pendidikan pada Sistem Pembelajaran E-Learning. *Jurnal Humaniora*, 15(2), 1–10.
- Sri Wahyuningsih, & Fadriati. (2022). Kesepakatan Etik dan Interpersonal dalam Evaluasi Program Pendidikan. *Al-Fahim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 58–72. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v4i1.224>
- Stephen, R. (2015). *Perilaku Organisasi*. Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru.
- Tanyid Madiantius. (2014). Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan. *Jurnal Jaffray*, 12 (2).
- Teni Aryanti, Supriyono Supriyono, and I. I. (2018). Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 10, no. 1, 1–13.